

TANGGUH DI TENGAH ARUS REGRESI: KETAHANAN DEMOKRASI DAN WACANA PENAMBAHAN MASA JABATAN PRESIDEN ERA JOKOWI

Langgeng Firmansyah

Afiliasi; UIN Sunan Ampel Surabaya

langgengfirman19@gmail.com

Abstrak

Studi tentang demokratisasi era Jokowi kebanyakan hanya terfokus pada persoalan kemunduran demokrasi. Sebaliknya, kajian yang mendiskusikan ketahanan demokrasi Indonesia relatif masih terbatas dan kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud untuk mendiskusikan bagaimana ketahanan demokrasi di tengah arus regresi yang berlangsung di era Jokowi. Kami berargumen bahwa ada penurunan kualitas demokrasi, namun pada saat yang sama juga mampu bertahan mencegah terjadinya erosi demokrasi. Fenomena ini akan ditinjau ulang menggunakan teori institusionalisasi demokrasi David Beetham dan ketahanan demokrasi serta pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif konvensional. Teknis pengumpulan data, peneliti mengadopsi studi kepustakaan dan dokumentasi. Dalam studi ini dapat disimpulkan gagalnya upaya meloloskan penambahan jabatan tiga periode menjadi fakta bahwa bekerjanya civil society untuk mempertahankan demokrasi, khususnya bentuk akuntabilitas vertikal dan diagonal. Masyarakat, pers, dan sebagian elit politik berperan sentral dengan bahu-membahu menolak wacana anomali tersebut, gerakan politik dalam bentuk ini dimaknai sebagai ketahanan demokrasi. Terpilihnya Ganjar Pranowo dalam nominasi juga berdampak dalam melemahkan gerakan penambahan periode jabatan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, meskipun demokrasi di Indonesia belakangan ini cukup merisaukan tetapi ada indikator kunci yang tetap membuat demokrasi tangguh.

kata kunci: *Regresi Demokrasi; Ketahanan Demokrasi; Jokowi*

Abstract

Studies on democratization in the Jokowi era have mostly focused on the issue of democratic backsliding. In contrast, studies that discuss the resilience of Indonesian democracy are relatively limited and have received less attention. Therefore, this article aims to discuss the resilience of democracy amidst the ongoing regression in the Jokowi era. We argue that there is a decline in the quality of democracy, but at the same time it is also able to survive to prevent the erosion of democracy. This phenomenon will be reviewed using David Beetham's theory of democratic institutionalization and democratic resilience

as well as a qualitative approach with a conventional qualitative content analysis method. Data collection techniques, the researcher adopts literature and documentation studies. In this study, it can be concluded that the failure of efforts to pass the addition of three terms of office is a fact that the work of civil society to maintain democracy, specially forms of vertical and diagonal accountability. The community, the press, and some political elites play a central role by working together to reject the anomalous discourse, a political movement in this form is interpreted as democratic resilience. The election of Ganjar Pranowo to the nomination also had an impact in weakening the movement to increase the term of office. Thus, it can be concluded that although democracy in Indonesia has recently been quite troubling, there are key indicators that still make democracy resilient.

Keywords: *Democratic Regression; Democratic Resilience; Jokowi*

Article History: Received 08 January 2024, Revised 14 June 2024, Accepted 14 June 2024, Available online 30 April 2024

Pendahuluan

Dalam laporan *The Economist Intelligence Unit* tahun 2021, demokrasi di Indonesia masih dianggap “demokrasi cacat”. Tertinggal di bawah Malaysia dan Timor Leste yang notabene negara tetangga terdeka.¹ Tahun 2021 V-dem juga menempatkan demokrasi Indonesia di urutan ke-73 dari 179 negara di dunia, dengan skor keseluruhan 0.45 dari skala 1.00.² Menurut Freedom House Indeks demokrasi Indonesia tahun 2022 masih dalam taraf partly free dengan skor total 59 dari skala 100, spesifiknya skor 30 untuk hak politik dan 29 untuk kebebasan sipil.³ Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin baik kualitas demokrasi di suatu negara.

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) mencatat ada beberapa pelanggaran terkait program pembangunan pemerintah, seperti Undang-undang Mineral dan Batu Bara (UU-Minerba) dan Cipta Lapangan Kerja (Ominus Law) di tahun 2020 yang dipandang sebagai karpet merah investasi di Indonesia. Akibat UU tersebut masyarakat

¹ EIU, “Democracy Index 2021: The China Challenge,” *The Economist Intelligence Unit*, 2022, 83.

² V-dem, “Autocratization Turns Viral,” *V-Dem*, 2021.

³ Freedom House, “Indonesia: FREEDOM IN THE WORLD 2022,” 2022, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022>.

menjadi korban terdampak, lalu dwi fungsi militer secara semu terasa dalam beberapa domain sipil, pelemahan KPK, dan problem paling umum dipersoalkan ialah mengenai UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) seringkali digunakan untuk meminimalisir suara-suara bernada kritis, khususnya di masa krisis pandemi.⁴ Amnesty Internasional dalam laporannya juga mencatat Indonesia masih berkutut dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, pembatasan kebebasan sipil dengan UU karet, hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi, kriminalisasi masyarakat adat, unlawful killing terhadap entitas yang berseberangan.⁵

Dengan kata lain, regresi demokrasi di Indonesia mengalami tren kenaikan signifikan era pemerintahan Jokowi, seperti menguatnya penggunaan populisme dan isu sektarianisme.⁶ Kepemimpinan Jokowi dianggap kurang demokratis dibanding pendahulunya, ada beberapa indikasi yang menandakan kemunduran demokrasi Indonesia, yaitu alih fungsi anggota militer aktif ke dalam ranah sipil, tidak kondusifnya hubungan nasionalis dengan konservatif kanan, dan favoritisme politik.⁷ Model kepemimpinan Jokowi yang menganut developmentalisme terlihat berfokus pada pembangunan infrastruktur, penataan ulang regulasi, dan perampingan birokrasi membuat pemerintah meminggirkan agenda reformasi.⁸

⁴ "2 Tahun Pemerintahan Kedua Presiden Joko Widodo: Rakyat Dikorbankan, Demokrasi Diabaikan," 2021, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/2-tahun-pemerintahan-kedua-presiden-joko-widodo-rakyat-dikorbankan-demokrasi-diabaikan/>.

⁵ Peter Benenson House, *Amnesty International Report 2021/22*, 2022.

⁶ Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation," *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): 479–97, <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>.

⁷ Wasisto Raharjo Jati, "Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021," *The Habibie Center THC Insights*, no. 27 (2021): 6, www.habibiecenter.or.id.

⁸ Eve Warburton, "Jokowi and the New Developmentalism," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52, no. 3 (2016): 297–320, <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262>.

Selain itu, praktik penggelembungan kekuasaan⁹ dan strategi politik terkini hanya bersandarkan koalisi oligarki dan pihak yang menguntungkan juga terjadi di era Jokowi.¹⁰ Thomas Power dan Eve Warburton menganggap regresi terjadi karena masalah dalam ranah struktur (lembaga negara) seperti aktor negara yang mempersempit domain demokrasi dan dalam tataran agensi (masyarakat) mengalami fragmentasi di tubuh kalangan sipil yang tidak pernah diselesaikan secara serius semenjak reformasi dan diperparah munculnya kekuatan politik akar rumput baru di era Jokowi.¹¹ Pendek kata, studi tentang demokratisasi era Joko Widodo (Jokowi) kebanyakan hanya terfokus pada persoalan kemunduran demokrasi/ democratic regression.

Sebaliknya, kajian yang mendiskusikan ketahanan demokrasi (democratic resilience) Indonesia relatif masih terbatas dan kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud untuk mendiskusikan bagaimana ketahanan demokrasi di tengah arus kemundurannya di era Jokowi. Kami berargumen bahwa ada penurunan kualitas demokrasi, namun pada saat yang sama juga mampu bertahan mencegah terjadinya erosi demokrasi yang lebih parah. Argumen tersebut sesungguhnya mengkonfirmasi ulang hal senada yang dikemukakan oleh Ken Setiawan¹² bahwa “while democratic decline continues, the process of regression is more uneven than commonly emphasised in assessments of Indonesian politics”.

Burnell dan Calvert mendefinisikan ketahanan demokrasi sebagai perlawanan yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dan ancaman terhadap demokrasi, sehingga proses tersebut berfungsi memitigasi kemunduran total demokrasi.¹³ Sementara Anna

⁹ Nancy Bermeo, “On Democratic Backsliding,” *Journal of Democracy* 27, no. 1 (2016): 5–19, <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>.

¹⁰ Liam Gammon, “Apakah Populisme Merupakan Ancaman Bagi Demokrasi Indonesia?,” in *Demokrasi Di Indonesia: Dari Stagnasi Ke Regresi*, 1st ed. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), 143.

¹¹ (Power dan Warburton, 2021).

¹² (2022).

¹³ Peter Burnell and Peter Calvert, “The Resilience of Democracy: An Introduction,” *Democratization* 6, no. 1 (1999): 1–32, <https://doi.org/10.1080/13510349908403594>.

Lührmann menilai ketahanan demokrasi sebagai kemampuan sebuah pemerintahan untuk mencegah atau menanggapi ancaman terhadap demokrasi tanpa kehilangan karakter demokrasinya.¹⁴ Dari dua pendapat tersebut dapat ditarik garis besar bahwa ketahanan demokrasi ialah kemampuan dari suatu rezim untuk menangani kemerosotan demokrasi secara sistematis. Demokrasi sejatinya sebuah sistem yang fleksibel dan inovatif, demokrasi bisa pulih dengan cepat meskipun dirundung masalah.

Hampir sama dengan temuan dalam bacaan sebelumnya, peneliti menemukan komposisi yang membuat demokrasi menjadi tangguh. Pertama, demokrasi bisa kuat karena mempunyai nilai yang selalu diminati oleh warga negara di dunia. Kedua, demokrasi kuat akibat selalu ada permintaan dari elemen sipil, khususnya dari kalangan intelektual dan perempuan yang menuntut hak mereka. Ketiga, mendesain dan menginovasi ketahanan bisa dilakukan jika warga negara mempunyai pengetahuan mengenai jenis-jenis tantangan dan krisis yang akan melanda mereka, sehingga bisa meminimalisir dampak yang akan terjadi.¹⁵

Sama seperti pendapat sebelumnya, Alexandre Volacu dan Paul Dragos Aligica berpendapat bahwa sumber ketahanan bisa diperoleh dari dua hal. Pertama dari semangat demokrasi perwakilan yang menyalurkan legitimasi masyarakat kepada lembaga-lembaga yang pejabatnya dipilih masyarakat dan bertugas mengambil sebuah kebijakan. Kedua, bersumber dari sistem pemilu yang adil dan bertanggungjawab. Pemilu harus berasaskan prinsip kontrol dan kesetaraan masyarakat dengan menghindari jenis pemilu yang memaksa untuk memilih salah satu kandidat dan memanipulasi pengaturan pemilu dengan cara-cara sistematis.¹⁶ Pendapat tersebut

¹⁴ Wolfgang Merkel and Anna Lührmann, "Resilience of Democracies: Responses to Illiberal and Authoritarian Challenges," *Democratization* 28, no. 5 (2021): 869–84, <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1928081>.

¹⁵ Timothy D. Sisk, *Democracy and Resilience Conceptual Approaches and Considerations* (Stockholm, 2017).

¹⁶ Timothy D. Sisk, *Democracy and Resilience Conceptual Approaches and Considerations* (Stockholm, 2017).

linear dengan pemikiran Anna Luhrmann dalam memandang kemunduran demokrasi, yaitu menggunakan konsep akuntabilitas, konsep akuntabilitas memiliki dua manfaat Pertama, menekankan batasan yang bersifat de-facto demi menghindari penyelewengan kekuasaan oleh pemerintah. Kedua, pengklasifikasian tiga macam akuntabilitas sebagai sekat antara masyarakat dan pemerintah. Dalam kajian akuntabilitas klasik hanya mengenal akuntabilitas vertikal (pemilu yang bebas, adil dan pemberian hak politik pada masyarakat) dan horizontal (peradilan, legislatif, dan lembaga pengawas demokrasi yang lain). Sementara bentuk baru yang dikenalkan Luhrmann adalah akuntabilitas diagonal, mencakup peran masyarakat dan aktivis untuk membatasi pemerintah ketika berkuasa terlampau jauh.¹⁷

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis isi kualitatif konvensional (Conventional Qualitative Content Analysis). Pendekatan analisis isi konvensional merupakan metode yang bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan mengungkap makna dari suatu objek baik itu tulisan teks, simbol, maupun materi literer lainnya. Downe-Wambolt menerangkan tujuan dari metode ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena yang diteliti.¹⁸ Metode ini juga memberi keleluasaan kepada peneliti mengenai pengkategorian data. Dalam konteks ini peneliti secara spesifik mengkategorikan data untuk mendalami penolakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

Selain itu, data pendukung juga berguna memperkaya sumber bacaan yang bertujuan memberi pandangan baru dalam penelitian ini. Sehingga peneliti akan mencari sumber yang relevan dengan indikator tersebut.¹⁹ Peneliti menggunakan konsep studi kepustakaan

¹⁷ Alexandru Volacu and Paul Dragos Aligica, "Conceptualising Democratic Resilience: A Minimalist Account," *Contemporary Politics*, 2023, <https://doi.org/10.1080/13569775.2023.2213536>.

¹⁸ Hsiu Fang Hsieh and Sarah E. Shannon, "Three Approaches to Qualitative Content Analysis," *Qualitative Health Research* 15, no. 9 (2005): 1277–88, <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>.

¹⁹ Hsieh and Shannon.

(Document Study) sebagai teknik penggalian data yang mengutamakan proses analisis data berasal dari sumber-sumber tertulis, bisa berupa perundang-undangan, jurnal, skripsi, tesis, catatan, koran, majalah, artikel, transkrip wawancara, dan video/film.²⁰

Hasil dan Diskusi penelitian

Selayang Pandang tentang Presiden Joko Widodo

Pada 2005 Joko Widodo (Jokowi) mulai menapaki karir politiknya dengan bergabung Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dan memenangkan pemilihan untuk Walikota Solo. Jokowi menggambarkan dirinya lahir tanpa privilegie, hidup sederhana, dan sering mengalami pengusuran tempat tinggal yang terlihat mempengaruhi gaya kepemimpinannya kental dengan aliran populis. Dapat dilihat diberbagai kebijakannya seperti, menekan angka kekerasan, menarik wisatawan mancanegara, dan gaya blusukannya yang menjadi daya tarik tersendiri.²¹ Tahun 2012 Lembaga City Mayors Foundation menominasikan Jokowi sebagai salah satu Walikota terbaik dunia atas semua inovasinya.²²

Berkat kepopulerannya, Jokowi mudah menduduki jabatan Walikota untuk periode kedua dan melenggang menuju kontestasi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyatakan kesediaannya mengusung Jokowi. Hasil musyawarah antara PDI-P dan Gerindra memutuskan bahwa Jokowi akan ditandemkan dengan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebagai wakilnya yang juga kader Gerindra. Dipertengahan jabatannya sebagai Gubernur Jakarta, nama Jokowi menguat dalam bursa calon Presiden 2014. Meningkatnya kepopuleran Jokowi juga berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas yang membuat namanya diperhitungkan. Hasil survei Centre for Strategic and Internasional

²⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, vol. 4 (CV. syakir Media Press, 2021).

²¹ Keen Achron, *JOKOWI Memimpin Dengan Hati*, AR-RUZZ MEDIA, vol. 1 (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017).

²² "The World Mayor Prize for Friendship between Cities," City Mayors Foundation, 2012, <http://worldmayor.com/contest-2023/about-world-mayor-2023.html>.

Studies (CSIS) menunjukkan bahwa nama Jokowi bertengger dipuncak teratas mengalahkan rivalnya, Prabowo Subianto dengan telak.²³

Indikasi elektabilitas yang menguat, membuat PDI-P mendeklarasikan Jokowi sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2014. Jokowi menggandeng Jusuf Kalla (JK) sebagai wakilnya dan melakukan deklarasi bersama dengan partai koalisi seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Nasional Demokrat (Nasdem) di tanggal 19 Mei 2014 yang diberi nama Koalisi Indonesia Hebat (KIH).²⁴ Hasil pilpres 2014 dimenangkan pasangan Jokowi-JK, mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa yang disokong koalisi raksasa dibentuk atas partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya (Golkar), koalisi pendukung Prabowo melabeli sejawat koalisi mereka dengan nama Koalisi Merah Putih (KMP). Mengutip hasil rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasangan Jokowi-JK mendapatkan 53,15% berbanding 46,85% untuk Prabowo-Hatta.²⁵

Mengawali perjalanan politiknya Jokowi kerap mendapat serangan secara masif dan sporadis, khususnya black campaign, isu Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan (SARA), dan hoax. Jokowi digambarkan sebagai calon presiden boneka yang dikendalikan oleh Megawati, kemudian dituduh sebagai muslim yang buruk, antek cukong, dan keturunan Cina. Skandal majalah Obor Rakyat merupakan manifestasi dari politik kotor untuk mendiskreditkan Jokowi. Dicetak hingga 100.000 eksemplar yang didistribusikan ke seluruh tempat-

²³ Heri Ruslan, "Sejumlah Warga Jakarta Dukung Jokowi Maju Di Pilpres 2014," *REPUBLIKA*, 2013, <https://news.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/21/moqdx9-sejumlah-warga-jakarta-dukung-jokowi-maju-di-pilpres-2014>.

²⁴ Kompas, "Jokowi: Cawapres Saya Jusuf Kalla," 2014, <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/19/1203166/Jokowi.Cawapres.Saya.Jusuf.Kalla>.

²⁵ "KPU Tetapkan Jokowi Menang Di Pilpres," *BBC NEWS Indonesia*, 2014, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140722_kpu_hasil_pilpres.

tempat ibadah di Pulau Jawa.²⁶ Polarisasi politik di periode pertama tampak mengkristal ketika partai-partai menghindari kompetisi berdasarkan program dan hanya bersandar preferensi isu-isu identitas. Diperparah belum pernah ada catatan koalisi sekuler-plural dengan konservatif kanan semenjak 1965. Sehingga setiap partai dengan dua ideologi tersebut berfokus merangkai koalisi dengan tujuan saling melawan dan berimplikasi pada pelestarian pembelahan ini di masyarakat.²⁷

Selain sentimen agama, masalah ketimpangan ekonomi juga memperburuk pembelahan di masyarakat dengan mentaunkannya dalam isu sektarian yang seringkali dipolitisasi.²⁸ Pada periode tersebut terjadi berbagai dinamika politik dalam negeri mengalami panas-dingin, seperti di tahun 2017 pemerintah tegas mengumumkan pembubaran organisasi keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) di tahun-tahun berikutnya. Pemerintah beralasan bahwa ormas itu memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Atas dasar alasan tersebut pemerintah membubarkan keduanya. Meskipun diiringi hujan kritik akibat prosedur hukumnya yang prematur, sehingga menimbulkan preseden neo-otoritarianisme.²⁹ Tahun 2019 untuk kali kedua, Jokowi kembali mengungguli rival utamanya, Prabowo Subianto dengan capaian 55,5% berbanding 44,5% suara.³⁰

²⁶ Adam Tyson and Budi Purnomo, "President Jokowi and the 2014 Obor Rakyat Controversy in Indonesia," *Critical Asian Studies* 49, no. 1 (2017): 117–36, <https://doi.org/10.1080/14672715.2016.1258585>.

²⁷ Wasisto Raharjo Jati, "Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (2022): 152–67, <https://doi.org/10.22146/jsp.66057>.

²⁸ Burhanuddin Muhtadi and Eve Warburton, "Inequality and Democratic Support in Indonesia," *Pacific Affairs* 93, no. 1 (2020): 31–58, <https://doi.org/10.5509/202093131>.

²⁹ Abdul Chalik, "Terjebak Antara Demokrasi Dan Kedaulatan Negara: Anomali Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Dan Bayang-Bayang Neo Otoritarianisme," *IC MUST 2017*, 2017, 58–60.

³⁰ "Indonesia Election: Joko Widodo Re-Elected as President - BBC News," accessed March 31, 2023, <https://www.bbc.com/news/world-asia-48331879>.

Mengawali periode kedua jabatan ini, Jokowi mulai mengkonsolidasikan partai-partai koalisinya. Konfigurasi koalisi di periode kedua ini penuh dengan kejutan, seperti rekonsiliasi dengan mantan rivalnya Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Menteri Pertahanan serta melakukan reshuffle beberapa Menterinya.³¹ Banyak partai-partai oposisi berputar haluan menjadi pendukung Jokowi, termasuk PAN di tahun 2021 memutuskan untuk bergabung dengan gerbong pemerintah.³² Praktis Jokowi menggenggam kekuatan mayoritas di DPR dengan persentase 81% kursi yang membuat pemerintah lebih mudah melakukan konsolidasi terkait agenda tertentu. Bergabungnya Gerindra dan PAN kedalam lingkaran pemerintah membuat kubu oposisi menjadi ringkih yang hanya beranggotakan PKS dan Demokrat.³³

Dan Slater melihat pola ini sebagai upaya kartel politik, karena oligarki turut serta menyeberang ke pemerintahan Jokowi. Ada indikasi bahwa oligarki ingin melindungi kepentingannya melalui lembaga-lembaga politik seperti DPR.³⁴ Tahun 2019 Revisi UU RUU KPK menjadi manifestasi nyata atas peran kartel politik yang melindungi kepentingan oligarki. Ada poin-poin krusial pelemahan tugas dan fungsi KPK, seperti kewenangan menyadap, menggeledah, dan penyitaan harus seizin Dewan Pengawas terlebih dahulu. Kemudian, personel KPK diwajibkan berasal dari unsur lembaga

³¹ Imam Budilaksono, "Prabowo Subianto Appointed Defense Minister in Jokowi's New Cabinet," *ANTARA*, October 23, 2019, <https://en.antaranews.com/news/135175/prabowo-subianto-appointed-defense-minister-in-jokowis-new-cabinet>.

³² "Indonesia's Jokowi Reshuffles Cabinet for the Third Time in His Current Term - CNA," accessed May 31, 2023, <https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-cabinet-reshuffle-jokowi-hadi-tjahjanto-zulkifli-hasan-2747601>.

³³ "PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi Di Simpang Jalan?," accessed May 21, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/22/10223631/pan-masuk-lingkaran-koalisi-jokowi-di-simpang-jalan>.

³⁴ Dan Slater, "PARTY CARTELIZATION, Indonesian Style: Presidential Power Sharing and the Contingency of Democratic Opposition," *Journal of East Asian Studies* 18, no. 1 (2018): 23–46, <https://doi.org/10.1017/jea.2017.26>.

penegak hukum eksisting, tidak diperbolehkan melakukan rekrutmen penyidik independen.³⁵

Di pertengahan tahun 2019 isu perpanjangan masa jabatan Presiden mencuat dalam ruang publik. Yang kebetulan bertepatan dengan momentum munculnya Pandemi Corona Virus Desease-19 (Covid-19) yang melanda dunia mendorong pemerintah melakukan penguatan kekuasaan dan membungkam oposisi dengan dalih kondisi darurat untuk pengendalian pandemi yang memerlukan penanganan komprehensif. Dalam kasus global terjadi di Hungaria dengan Victor Orban yang memenangkan voting untuk memimpin berlandaskan hasil dekrit.³⁶ Sementara di Filipina, Rodrigo Duterte mencoba mengikuti langkah tersebut untuk membungkan lawan-lawan politiknya. Meskipun pada akhirnya Jokowi tidak mengikuti langkah ini karena memiliki pertimbangan sosial-politik tertentu. Namun, pemerintah seakan memperlebar kekuasaannya melalui intervensi lembaga-lembaga politik penyeimbang demokrasi. Mengingat dalam kurun waktu tersebut pandemi Covid-19 masih melanda, membuat pemerintahan terpuak dalam berbagai bidang, terkhusus kesehatan dan ekonomi.³⁷

Ditengah carut-marut Covid-19, tensi politik cenderung tidak stabil akibat diskursus yang beredar dalam ruang publik, seperti isu penambahan masa jabatan Presiden atau penundaan pemilu. Sebagian ilmuwan politik melihat kemerosotan demokrasi semakin parah di tengah Covid-19 ini. Akibat meningkatnya aliran populisme di masyarakat yang berkeyakinan kontra terhadap konsep medis,

³⁵ "Revisi UU KPK: Posisi Presiden Jokowi 'Penyelamat Atau Pembunuh KPK'? - BBC News Indonesia," accessed March 31, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49643463>.

³⁶ "Hungary Passes Law That Will Let Orbán Rule by Decree | Hungary | The Guardian," accessed May 31, 2023, <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/hungary-jail-for-coronavirus-misinformation-viktor-orban>.

³⁷ Marcus Mietzner, "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 2 (2020): 227-49, <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>.

konservatisme agama, polarisasi, korupsi yang merajalela, serta munculnya aktor anti demokrasi.³⁸ Serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU Cipta Kerja) oleh DPR di tahun 2020 memancing keresahan kalangan masyarakat menolak RUU ini karena alasan pengurangan hak buruh hingga potensi kerusakan lingkungan. Namun, yang lebih buruk adalah minimnya proses deliberasi dalam penyusunan RUU tersebut mereduksi semangat perwakilan yang sudah didelegasikan. Sejatinya DPR memiliki kedaulatan otonom yang tidak terhubung pada cabang-cabang kekuasaan semacam eksekutif maupun yudikatif.³⁹

Di lain sisi, supremasi perlindungan perempuan mendapat lampu hijau, seperti UU sensitif gender yang disahkan DPR menuai keberhasilan bagi kalangan aktivis perempuan, meskipun proses ini memakan waktu yang lama akibat terlempar dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Diperparah dengan pandemi yang berkontribusi melemahkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi.⁴⁰ Sehingga UU-TPKS tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan seksual dipelbagai sektor.

Gagalnya Upaya Penambahan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Wacana penambahan masa jabatan Presiden sebenarnya sudah bergulir sejak era Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kendati hanya sebatas wacana yang dikemudian hari tenggelam oleh kritik masyarakat. Wacana ini terdengar nyaring kembali di era Jokowi. Pasca dilontarkan politisi partai Nasdem pada 2019 yang memandang perlunya penambahan perodesasi jabatan Presiden. Informasi ini diungkap oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa.

³⁸ Marcus Mietzner, *Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response*, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, vol. 39, 2020, <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>.

³⁹ Saru Arifin, "Illiberal Tendencies in Indonesian Legislation: The Case of the Omnibus Law on Job Creation," *Theory and Practice of Legislation* 9, no. 3 (2021): 386–403, <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942374>.

⁴⁰ Rachael Diprose, Ken M.P. Setiawan, and Bronwyn Beech Jones, "Gender Equity Reversals and Women's Responses to COVID-19 in Rural Indonesia," *Melbourne Asia Review* 13, no. March (2023), <https://doi.org/10.37839/mar2652-550x13.3>.

Fraksinya berharap ada amandemen UUD 1945 mengenai periodisasi jabatan Presiden. Menurut Nasdem pertimbangan penambahan masa jabatan Presiden dilatarbelakangi oleh efisiensi pemerintahan, ketika pemerintah yang berkuasa memiliki program yang bermanfaat dan jabatan Presiden akan segera habis ditakutkan pembangunan terhenti, tentu diperlukan sebuah kesinambungan atas program tersebut.⁴¹

Senada dengan pendapat Nasdem, usulan tentang masa jabatan Presiden juga disuarakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, dengan konfigurasi yang berbeda, seperti perubahan jabatan Presiden menjadi satu periode memiliki rentang waktu tujuh tahun, hal ini dinilai sebagai solusi agar Presiden fokus bekerja dan menghemat anggaran pemilu.⁴² Di tahun 2021 isu tersebut menggelinding kembali, kali ini mantan Ketua MPR Amien Rais mengungkapkan bahwa ada skenario yang dipersiapkan untuk memuluskan wacana jabatan tiga periode menjadi kenyataan. Pertama, MPR akan menggelar Sidang Istimewa untuk melakukan amandemen pada pasal yang berkaitan dengan jabatan Presiden. Kedua, akan ditawarkan amandemen jabatan tiga periode.⁴³

Terulang kembali di tahun 2022 sejumlah pembantu Presiden dan partai penyokong pemerintah ramai-ramai menghembuskan isu perpanjangan/penundaan pemilu dengan beragam alasan, berikut beberapa diantaranya. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Kemaritiman dan Investasi terseret wacana ini, akibat sikapnya yang membela usulan perpanjangan masa jabatan dari kelompok Ulama Banten dan sikap ratusan Kepala Desa di Jakarta yang berharap jabatan

⁴¹ "Nasdem Wacanakan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode," accessed March 13, 2023,

<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/26/14535621/nasdem-wacanakan-penambahan-masa-jabatan-presiden-jadi-3-periode>.

⁴² "Polemik Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden | Republika Online," accessed March 13, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/19/11/22/q1d2fx409-polemik-usulan-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>.

⁴³ "Amien Rais Sebut Ada Skenario Jabatan Presiden Jadi 3 Periode," accessed March 14, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/08430071/amien-rais-sebut-ada-skenario-jabatan-presiden-jadi-3-periode>.

Presiden diperpanjang.⁴⁴ Ketua MPR Bambang Soesatyo juga berujar untuk menunda pemilu karena bangsa masih dalam proses pemulihan pasca Covid-19 dan pemilu serentak berpotensi memanaskan kondisi politik nasional.⁴⁵

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengutarakan bahwa ada keinginan dari para pengusaha yang menginginkan pemilu ditunda karena usaha mereka belum pulih sepenuhnya akibat badai Covid-19 dan berharap tidak terganggu oleh proses suksesi kepemimpinan yang seringkali membawa agenda berbeda.⁴⁶ Sikap Ketua Umum PKB, PAN, dan Golkar juga senada dengan pernyataan Bahlil mengenai penundaan pemilu akan mendukung proses recovery ekonomi pasca pandemi.⁴⁷ Sontak saja wacana ini mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, baik masyarakat, akademisi, dan politisi. Masyarakat sangat resisten dengan wacana ini, khususnya kubu oposisi dan mahasiswa yang menolak dengan melakukan unjuk rasa di penjuru negeri. Presiden sendiri sudah bersuara sejak isu ini berhembus di tahun 2019 yang berpendapat bahwa isu tersebut sengaja digulirkan untuk menjerumuskan dan mencari muka pada dirinya.⁴⁸

Pernyataan keras penolakan Jokowi terhadap wacana tiga periode di tahun 2019. Jokowi menekankan untuk patuh dalam aturan bernegara dan menghindari terjadinya amandemen. Urusan amandemen hanya berlaku untuk haluan negara. Jokowi secara

⁴⁴ "Nama Luhut Di Pusaran Isu Jokowi 3 Periode Yang Diserukan Kepala Desa Sampai Tokoh Daerah," accessed March 14, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/14543541/nama-luhut-di-pusaran-isu-jokowi-3-periode-yang-diserukan-kepala-desa-sampai>.

⁴⁵ Metro TV, "Ketua MPR: Pikir Ulang Gelar Pemilu Di Tahun 2024" (Indonesia, 2022), <https://youtu.be/3AY3fBeB0nw>.

⁴⁶ "Bahlil Lahadalia Ungkap Alasan Pengusaha Ingin Pilpres 2024 Diundur," accessed March 14, 2023, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220110/15/1487254/bahlil-lahadalia-ungkap-alasan-pengusaha-ingin-pilpres-2024-diundur>.

⁴⁷ "Muhaimin PKB Sibuk Keliling, Usulannya Soal Tunda Pemilu 2024 Belum Berlanjut - Nasional Tempo.Co," accessed March 14, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1568512/muhaimin-pkb-sibuk-keliling-usulannya-soal-tunda-pemilu-2024-belum-berlanjut>.

⁴⁸ "(27) Jawaban Jokowi Soal Usul Presiden 3 Periode - YouTube," accessed March 13, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=4600Q7LGU-s>.

eksplisit memberikan sangkalan dan menganggap pihak yang menghembuskan isu ini memiliki kepentingan politik praktis. Baik untuk partai-partai pengusung maupun pembantunya di kabinet. Yang menjadi anomali tentu saja sikap PDI-P sebagai pengusung utama Jokowi berseberangan dengan niat partai koalisi yang lain, PDI-P solid menolak keras wacana perpanjangan jabatan karena tidak memiliki urgensi apapun. Partai Demokrat melalui Ketua Majelis Tinggi Partai, SBY mengingatkan pemerintah yang berkuasa bahwa pentingnya taat kepada konstitusi dan menjaga prinsip “checks and balances” agar terus berlangsung.⁴⁹

PKS juga memiliki kesamaan sikap dengan Demokrat dan PDI-P yang sudah sedari awal tegas menolak keras wacana tiga periode serta pemilihan kembali oleh MPR. Alasan yang dikemukakan PKS karena semua wacana tersebut berpotensi merusak demokrasi dan sistem presidensial yang sudah berjalan.⁵⁰ Partai Gerindra seirama tegas menolak karena ketentuan yang ada dianggap sudah ideal dengan semangat demokrasi. Sementara PPP memilih bersikap hati-hati dengan alasan masih menghimpun seluruh kajian terkait perpanjangan masa jabatan Presiden.⁵¹ Berdasarkan dinamika yang sudah terjadi dapat dipahami bahwa akuntabilitas horizontal (parlemen) sudah melakukan fungsinya dengan melakukan koreksi atas wacana yang beredar dengan melakukan protes, dengan bukti banyak partai-partai pengusung utama Jokowi menolak rencana ini, seperti PDI-P dan Gerindra yang didukung kebulatan partai oposisi yakni Demokrat dan PKS.

⁴⁹ “Sindir Wacana Jokowi 3 Periode Dan Penundaan Pemilu 2024, Ini Kata SBY - Nasional Tempo.Co,” accessed March 14, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1583163/sindir-wacana-jokowi-3-periode-dan-penundaan-pemilu-2024-ini-kata-sby>.

⁵⁰ Friski Riana, “PKS Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode - Nasional Tempo.Co,” Tempo.co, November 30, 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1278409/pks-tolak-masa-jabatan-presiden-3-periode>.

⁵¹ Kristian Erdianto, “Gerindra: Masa Jabatan Presiden Jangan Terlalu Lama, 2 Periode Cukup,” *Kompas.Com*, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/21/16500241/gerindra-masa-jabatan-presiden-jangan-terlalu-lama-2-periode-cukup>.

Fakta ini berkesesuaian dengan konsep ketahanan demokrasi, institusionalisasi demokrasi, dan akuntabilitas yang sama-sama mengedepankan fungsi partisipasi perwakilan untuk mengimbangi ruang gerak eksekutif dalam memutuskan suatu kebijakan. Dalam kesempatan yang lain terekam jelas pandangan Jokowi terhadap isu ini mulai berubah, beberapa kali Jokowi memberikan gestur diplomatis dengan isu ini. Relawan Jokowi juga berkontribusi atas ramainya polemik ini. Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara-JP) contohnya mendukung wacana tiga periode. Jokowi mengisyaratkan wacana penundaan pemilu sah-sah saja diutarakan oleh masyarakat karena bagian dari demokrasi.⁵²

Pernyataan tersebut kontradiksi dengan apa yang sudah disampaikan Jokowi sebelumnya tentang penolakannya terhadap isu tersebut. Hal tersebut sekaligus mengundang tanya mengenai komitmen Jokowi untuk menegakkan agenda reformasi. Khususnya jika menilik definisi demokrasi David Beetham yang menyinggung mengenai realisasi suatu prinsip-prinsip yang sudah disepakati dan tidak membuka ruang untuk memperdebatkannya. Dapat dipahami isu perpanjangan Presiden terlihat meremehkan konstitusi yang menjadi konsensus masyarakat luas. Tahun 2023 kembali diramaikan oleh wacana penundaan pemilu, kali ini gugatan dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menang. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memberi sanksi kepada KPU untuk menunda pemilu selama 2 tahun, 4 bulan, 7 hari atau pemilu dilaksanakan tahun 2025.⁵³ PDI-P sebagai partai pengusung utama Jokowi, tegas menolak wacana ini dengan dalil putusan yang

⁵² Kompas.TV, "Sikap Jokowi Soal Perpanjangan Masa Jabatan, Dulu Sebut Tak Berminat Kini Bilang Bagian Demokrasi" (Indonesia, 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=sIEg9MneapQ>.

⁵³ "PN Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu Ditunda Hingga 2025, Refly Harun: Putusan Gila," accessed March 14, 2023, <https://nasional.sindonews.com/read/1036627/13/pn-jakarta-pusat-perintahkan-pemilu-ditunda-hingga-2025-refly-harun-putusan-gila-1677758614>.

dilakukan PN Jakarta Pusat tidak sesuai domain untuk menangani sengketa peraturan pemilu.⁵⁴

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD mensinyalir ada kekuatan dibalik tuntutan yang dilayangkan partai Prima dan memastikan melawan putusan penundaan pemilu 2024 tersebut. Mahfud menilai bahwa putusan ini diluar yurisdiksi hakim dan menegaskan pemerintah akan tetap melaksanakan mekanisme pemilu 2024.⁵⁵ Disandarkan dengan dugaan oposisi yang melihat elit-elit koalisi pemerintah bergerilya melakukan lobi kepada partai-partai parlemen untuk memungkinkan melakukan amandemen tentu sangat berbahaya. Meskipun begitu tetap ada faksi pejabat yang resisten akan isu ini. Akhirnya isu penambahan jabatan menjadi melemah, ditambah kebosanan masyarakat serta desakan elemen sipil untuk menolak wacana ini. Hal ini menandakan bahwa akuntabilitas diagonal masih bekerja, yaitu elemen sipil seperti mahasiswa, kelompok oposisi, dan pers memberikan kritik keras kepada pemerintah. Seiring berjalannya waktu menuju tahun politik 2024, peta politik berubah sesuai dinamika yang ada. Setelah wacana perpanjangan masa jabatan Presiden tenggelam oleh kritik publik, kini khalayak politik diramaikan oleh penetapan Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden oleh partai Nasdem yang membuat hubungan Jokowi dan salah satu partai pengusungnya ini merenggang.⁵⁶

Dinamika penetapan Ganjar Pranowo tidak lepas dari kegusaran Jokowi yang mengenai perlindungan politik dan keberlanjutan proyek-proyek yang ia gagas di masa depan. Hubungannya dengan PDI-P yang merenggang karena Jokowi “ngotot” mendukung Ganjar daripada Puan

⁵⁴ Ahda Bayhaqi, “PDIP Tolak Putusan PN Soal Tahapan Pemilu 2024 Tak Dilanjutkan, Ini Alasannya,” *Merdeka.Com*, 2023, <https://www.merdeka.com/politik/pdip-tolak-putusan-pn-soal-tahapan-pemilu-2024-tak-dilanjutkan-ini-alasannya.html>.

⁵⁵ Andrian Pratama Taher, “Mahfud Tuding Ada Permainan Soal Putusan Penundaan Pemilu 2024,” *tirto.id*, March 5, 2023, <https://tirto.id/mahfud-tuding-ada-permainan-soal-putusan-penundaan-pemilu-2024-gDby>.

⁵⁶ Fitria Chusna Farisa, “Jokowi Tak Blak-Blakan Tentang Nasdem Capreskan Anies Karena Dinilai Jaga Kondisi Politik,” *Kompas.Com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/15/13233251/jokowi-tak-blak-blakan-tentang-nasdem-capreskan-anies-karena-dinilai-jaga>.

Maharani notabene anak dari Ketua Umum PDI-P yang tengah dipersiapkan sebagai calon Presiden.⁵⁷ Disinggung juga dengan potensi Jokowi menjadi Kingmaker jika skenario pencapresan Ganjar menemui jalan buntu. Terlihat dalam beberapa waktu akhir-akhir ini Jokowi kerap memberi sinyal kepada berbagai tokoh politik seperti Prabowo, Erick Tohir, Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi alternatif suksesornya dimasa mendatang.⁵⁸ Peneliti memiliki argumen bahwa isu ini memang “dibiarkan” oleh petahana yang belum menemukan suksesor yang tepat. Langkah ini menjadi krusial karena ada banyak pekerjaan yang belum selesai oleh pemerintahan sekarang. Bersandar kepada analisis pengamat politik Adi Prayitno mengatakan alasan Jokowi aktif melakukan endorse kepada banyak nama karena ingin memastikan agar yang bertanding dalam Pilpres 2024 adalah orang-orang dekat Jokowi agar bisa memberi jaminan kelanjutan program yang belum selesai.⁵⁹

Petahana memberikan sinyal-sinyal intervensi secara tidak langsung kepada calon-calon potensial di Pilpres 2024 mendatang. Jokowi merasa tidak nyaman ketika kubu oposisi yang menjagokan Anies Baswedan sebagai calon Presiden dan diperburuk dengan manuver Nasdem yang notabene masih menjadi anggota koalisi Jokowi beralih haluan sebagai deklarator utama Anies. Pada akhirnya Ganjar Pranowo didaulat oleh PDI-P yang sekaligus direstui oleh Jokowi sebagai calon Presiden untuk pemilu 2024.⁶⁰ Sebelumnya, ketika PDI-P belum menetapkan Ganjar sebagai calon Presiden, banyak manuver-manuver politik yang ingin melakukan revisi atas masa jabatan Presiden, agar Jokowi bisa menyelesaikan kebijakan infrastrukturnya.

Pasca penetapan Ganjar menjadi calon Presiden, Jokowi merasa percaya diri karena sudah mempunyai figur yang dirasa tepat menjadi

⁵⁷ Tempo, “Operasi Senyap Dari Batutulis,” *Tempo*, 2023.

⁵⁸ Tempo, “Makcomblang Di Pematang Sawah,” *Tempo*, 2023.

⁵⁹ Kompas.TV, “IKUT CAMPUR PILPRES 2024, JOKOWI INGIN PROGRAMNYA DILANJUTKAN?” (Indonesia: Kompas.TV, 2023), <https://youtu.be/ChcVhJXLgps>.

⁶⁰ Heru Andriyanto, “PDI-P Announces Ganjar Pranowo as Presidential Candidate for 2024,” April 21, 2023, <https://jakartaglobe.id/news/pdip-announces-ganjar-pranowo-as-presidential-candidate-for-2024>.

suksesor. Peneliti menilai bahwa berhentinya wacana tiga periode memang dampak bekerjanya kritik akuntabilitas horizontal (DPR) dan diagonal (masyarakat dan pers) yang didalamnya termasuk PDI-P sebagai partai pengusung utama Jokowi. Meskipun pada perjalanannya terjadi banyak dinamika mengenai tarik-ulur penetapan calon Presiden. Selain itu dapat dilihat pula atas dasar bargaining dan political will dari elit-elit politik berimbas mempercepat penyelesaian polemik ini. Dalam konteks yudikatif juga hampir mendapati hal sama, seperti polemik Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengkaji kemungkinan pemilu dengan sistem proporsional tertutup dikhawatirkan akan mereduksi semangat representasi masyarakat di masa depan. Meskipun pada akhirnya MK menetapkan pemilu mendatang tetap mengadaptasi sistem proporsional terbuka.⁶¹

Penetapan Ganjar sebagai calon Presiden dari PDI-P disambut suka-cita berbagai kalangan, khususnya oposisi yang beberapa waktu merasa gusar akan wacana tiga periode yang dapat memundurkan agenda demokrasi. Sebagai contoh, partai Demokrat dan PKS. Terang-terangan kedua partai tersebut memberikan pujian dan harapan kepada pemilu mendatang yang hendaknya berjalan bersih, jujur, dan adil.⁶² Bagaimanapun setelah penetapan Ganjar sebagai calon Presiden dapat mematahkan dugaan perpanjangan jabatan Presiden masih tidak bisa menutupi perilaku pejabat negara yang melakukan endorse wacana tersebut, berkenaan dengan Jokowi sendiri menyatakan akan “cawe-cawe” dalam Pilpres 2024 mendatang dengan dalih demi kepentingan negara.⁶³

⁶¹ Mahkamah Konstitusi, “Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Pub. L. No. 114/PUU-XX/2022 (2023), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9055_1686802727.pdf.

⁶² Fath Putra Mulya, “PKS Siap Kawal Pilpres Yang Luber Jurdil Setelah Penetapan Ganjar,” *ANTARA*, April 21, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3500544/pks-siap-kawal-pilpres-yang-luber-jurdil-setelah-penetapan-ganjar>.

⁶³ Kompas.TV, “Jokowi: ‘Cawe-Cawe’ Untuk Kepentingan Positif, Tidak Gunakan Kekuasaan TNI Dan Polri” (2023), <https://youtu.be/MiRowxBkOX8>.

“Cawe-cawe” Jokowi dimaknai luas oleh berbagai kalangan, baik oleh mitra koalisi yang menganggap statement Jokowi bersifat normatif untuk menjaga stabilitas nasional agar pemilu berjalan demokratis, jujur, dan adil serta mengawal pemilu dari konflik sosial yang menimbulkan polarisasi.⁶⁴ Dalam perspektif oposisi, khususnya partai Demokrat melihat “cawe-cawe” Jokowi tidak etis dan berlebihan, terlepas dari niatnya untuk menjaga kestabilan negara. Diksi tersebut dipahami Demokrat sebagai upaya intervensi.⁶⁵ Melihat dialektika ini melalui scope teori David Beetham tentang pemilu yang bebas diberbagai tingkatan dalam konteks ini Pemilu Presiden memang terlihat gamang, berkenaan dengan statement Presiden yang dimaknai negatif oleh kelompok oposisi. Namun, Beetham melanjutkan teorinya dengan memperlihatkan keterbatasan pemilu jika tidak diawasi oleh lembaga yang independen. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menunjukkan bahwa sistem pemilu dilengkapi dengan perangkat pengawasan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas menyelenggarakan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki fungsi pencegahan, penindakan pelanggaran, dan mengawasi persiapan pemilu. Perangkat terakhir adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas dan berwenang menerima aduan tentang pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu dan memberi sanksi etik kepada penyelenggara pemilu. Ketiganya lembaga negara tersebut bersifat independen yang bertanggungjawab kepada

⁶⁴ Alinda Hardiantoro, “Apa Arti Kata ‘Cawe-Cawe’ Yang Sering Diucapkan Jokowi Jelang Pilpres?,” *Kompas.Com*, May 30, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/30/140000865/apa-arti-kata-cawe-cawe-yang-sering-diucapkan-jokowi-jelang-pilpres-?page=all#page2>.

⁶⁵ Isnaya Helmi, “Demokrat Nilai Cawe-Cawe Jokowi Tak Etis: Bagaimanapun Maknanya Jelas Negatif,” *Kompas.TV*, June 3, 2023, <https://www.kompas.tv/nasional/412785/demokrat-nilai-cawe-cawe-jokowi-tak-etis-bagaimanapun-maknanya-jelas-negatif>.

Undang-Undang dan menyampaikan laporan periodik kepada DPR-RI dan Presiden.⁶⁶

Atas hasil tersebut dapat ditarik garis besar mengenai kondisi pemilu di Indonesia, termasuk akuntabilitas vertikal (pemilu) masih dilindungi oleh lembaga-lembaga penopang akuntabilitas horizontal (KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR-RI). Meskipun masih terbuka kemungkinan terjadi kecurangan dalam pemilu mendatang, mengingat dinamika dalam konteks ini masih bergulir. Hal ini sekaligus membuka peluang penelitian terbaru mengenai pelaksanaan Pemilu Presiden yang berasaskan bersih dan jujur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil data, riset, dan analisis yang sudah dilakukan peneliti terhadap beberapa komponen demokrasi dari gagalnya wacana Presiden tiga periode yang tercipta akibat terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai capres yang dipahami publik sebagai sosok yang direstui Jokowi, tekanan masyarakat luas, dan lembaga legislatif. Terpilihnya Ganjar sebagai capres dari PDI-P seakan menjawab ketegangan yang menjangkiti khalayak serta kelompok oposisi. Hal ini lumrah terjadi akibat dampak banyaknya koalisi petahanan yang mengkampanyekan wacana penambahan jabatan Presiden. Sebaliknya, wacana ini disambut kritik tajam masyarakat dan bersatunya elit politik, bahkan dari partai utama pengusung Jokowi. Selain itu, sistem pemilu di Indonesia masih dalam pengawasan lembaga negara independen yang berperan sebagai akuntabilitas horizontal (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Hal ini menjadi substansial meskipun masih mendapat intervensi dalam cara-cara lain.

⁶⁶ Presiden dan DPR, "UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" (2017), <https://drive.google.com/file/d/1SUJFqUQxEmvPPprlJTrbxCigkUHroSCN/view>.

Daftar Pustaka

- “(27) Jawaban Jokowi Soal Usul Presiden 3 Periode - YouTube.” Accessed March 13, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=4600Q7LGU-s>.
- “2 Tahun Pemerintahan Kedua Presiden Joko Widodo: Rakyat Dikorbankan, Demokrasi Diabaikan,” 2021. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/2-tahun-pemerintahan-kedua-presiden-joko-widodo-rakyat-dikorbankan-demokrasi-diabaikan/>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press. Vol. 4. CV. syakir Media Press, 2021.
- Achron, Keen. *JOKOWI Memimpin Dengan Hati*. AR-RUZZ MEDIA. Vol. 1. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017.
- Ahda Bayhaqi. “PDIP Tolak Putusan PN Soal Tahapan Pemilu 2024 Tak Dilanjutkan, Ini Alasannya.” *Merdeka.Com*, 2023. <https://www.merdeka.com/politik/pdip-tolak-putusan-pn-soal-tahapan-pemilu-2024-tak-dilanjutkan-ini-alasannya.html>.
- “Amien Rais Sebut Ada Skenario Jabatan Presiden Jadi 3 Periode.” Accessed March 14, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/08430071/a-mien-rais-sebut-ada-skenario-jabatan-presiden-jadi-3-periode>.
- Arifin, Saru. “Illiberal Tendencies in Indonesian Legislation: The Case of the Omnibus Law on Job Creation.” *Theory and Practice of Legislation* 9, no. 3 (2021): 386–403. <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942374>.
- “Bahlil Lahadalia Ungkap Alasan Pengusaha Ingin Pilpres 2024 Diundur.” Accessed March 14, 2023. <https://kabar24.bisnis.com/read/20220110/15/1487254/bahlil-lahadalia-ungkap-alasan-pengusaha-ingin-pilpres-2024-diundur>.
- Bermeo, Nancy. “On Democratic Backsliding.” *Journal of Democracy* 27, no. 1 (2016): 5–19. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>.

- Budilaksono, Imam. "Prabowo Subianto Appointed Defense Minister in Jokowi's New Cabinet." *ANTARA*. October 23, 2019. <https://en.antaranews.com/news/135175/prabowo-subianto-appointed-defense-minister-in-jokowis-new-cabinet>.
- Burnell, Peter, and Peter Calvert. "The Resilience of Democracy: An Introduction." *Democratization* 6, no. 1 (1999): 1–32. <https://doi.org/10.1080/13510349908403594>.
- Chalik, Abdul. "Terjebak Antara Demokrasi Dan Kedaulatan Negara: Anomali Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Dan Bayang-Bayang Neo Otoritarianisme." *IC MUST 2017*, 2017, 58–60.
- Diprose, Rachael, Ken M.P. Setiawan, and Bronwyn Beech Jones. "Gender Equity Reversals and Women's Responses to COVID-19 in Rural Indonesia." *Melbourne Asia Review* 13, no. March (2023). <https://doi.org/10.37839/mar2652-550x13.3>.
- DPR, Presiden dan. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017). <https://drive.google.com/file/d/1SUJFqUQxEmvPPprlJTrbxCigkUHroSCN/view>.
- EIU. "Democracy Index 2021: The China Challenge." *The Economist Intelligence Unit*, 2022, 83.
- Erdianto, Kristian. "Gerindra: Masa Jabatan Presiden Jangan Terlalu Lama, 2 Periode Cukup." *Kompas.Com*, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/21/16500241/gerindra-masa-jabatan-presiden-jangan-terlalu-lama-2-periode-cukup>.
- Farisa, Fitria Chusna. "Jokowi Tak Blak-Blakan Tentang Nasdem Capreskan Anies Karena Dinilai Jaga Kondisi Politik." *Kompas.Com*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/15/13233251/jokowi-tak-blak-blakan-tentang-nasdem-capreskan-anies-karena-dinilai-jaga>.
- Friski Riana. "PKS Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode - Nasional

- Tempo.Co.” Tempo.co, November 30, 2019. <https://nasional.tempco.co/read/1278409/pks-tolak-masa-jabatan-presiden-3-periode>.
- Gammon, Liam. “Apakah Populisme Merupakan Ancaman Bagi Demokrasi Indonesia?” In *Demokrasi Di Indonesia: Dari Stagnasi Ke Regresi*, 1st ed., 143. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.
- Hardiantoro, Alinda. “Apa Arti Kata ‘Cawe-Cawe’ Yang Sering Diucapkan Jokowi Jelang Pilpres?” *Kompas.Com*. May 30, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/30/140000865/apa-arti-kata-cawe-cawe-yang-sering-diucapkan-jokowi-jelang-pilpres-?page=all#page2>.
- Helmi, Isnaya. “Demokrat Nilai Cawe-Cawe Jokowi Tak Etis: Bagaimanapun Maknanya Jelas Negatif.” *Kompas.TV*. June 3, 2023. <https://www.kompas.tv/nasional/412785/demokrat-nilai-cawe-cawe-jokowi-tak-etis-bagaimanapun-maknanya-jelas-negatif>.
- Heru Andriyanto. “PDI-P Announces Ganjar Pranowo as Presidential Candidate for 2024,” April 21, 2023. <https://jakartaglobe.id/news/pdip-announces-ganjar-pranowo-as-presidential-candidate-for-2024>.
- House, Freedom. “Indonesia: FREEDOM IN THE WORLD 2022,” 2022. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022>.
- House, Peter Benenson. *Amnesty International Report 2021/22*, 2022.
- Hsieh, Hsiu Fang, and Sarah E. Shannon. “Three Approaches to Qualitative Content Analysis.” *Qualitative Health Research* 15, no. 9 (2005): 1277–88. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>.
- “Hungary Passes Law That Will Let Orbán Rule by Decree | Hungary | The Guardian.” Accessed May 31, 2023. <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/hungary->

jail-for-coronavirus-misinformation-viktor-orban.

“Indonesia’s Jokowi Reshuffles Cabinet for the Third Time in His Current Term - CNA.” Accessed May 31, 2023. <https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-cabinet-reshuffle-jokowi-hadi-tjahjanto-zulkifli-hasan-2747601>.

“Indonesia Election: Joko Widodo Re-Elected as President - BBC News.” Accessed March 31, 2023. <https://www.bbc.com/news/world-asia-48331879>.

Jati, Wasisto Raharjo. “Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021.” *The Habibie Center THC Insights*, no. 27 (2021): 6. www.habibiecenter.or.id.

———. “Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (2022): 152–67. <https://doi.org/10.22146/jsp.66057>.

Kompas.TV. “IKUT CAMPUR PILPRES 2024, JOKOWI INGIN PROGRAMNYA DILANJUTKAN?” Indonesia: Kompas.TV, 2023. <https://youtu.be/ChcVhJXLgps>.

———. Jokowi: “Cawe-Cawe” untuk Kepentingan Positif, Tidak Gunakan Kekuasaan TNI dan Polri (2023). <https://youtu.be/MiRowxBkOX8>.

———. “Sikap Jokowi Soal Perpanjangan Masa Jabatan, Dulu Sebut Tak Berminat Kini Bilang Bagian Demokrasi.” Indonesia, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=sIEg9MneapQ>.

Kompas. “Jokowi: Cawapres Saya Jusuf Kalla,” 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/19/1203166/Jokowi.Cawapres.Saya.Jusuf.Kalla>.

Konstitusi, Mahkamah. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 114/PUU-XX/2022 (2023). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9055_1686802727.pdf.

"KPU Tetapkan Jokowi Menang Di Pilpres." BBC NEWS Indonesia, 2014.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140722_kpu_hasil_pilpres.

Melis G. Laebens & Anna Lührmann. "What Halts Democratic Erosion? The Changing Role of Accountability." *Routledge*, 2021.

Merkel, Wolfgang, and Anna Lührmann. "Resilience of Democracies: Responses to Illiberal and Authoritarian Challenges." *Democratization* 28, no. 5 (2021): 869–84. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1928081>.

Mietzner, Marcus. "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 2 (2020): 227–49. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>.

———. *Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. Journal of Current Southeast Asian Affairs*. Vol. 39, 2020. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>.

Mietzner, Marcus, and Burhanuddin Muhtadi. "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation." *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): 479–97. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>.

"Muhaimin PKB Sibuk Keliling, Usulannya Soal Tunda Pemilu 2024 Belum Berlanjut - Nasional Tempo.Co." Accessed March 14, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1568512/muhaimin-pkb-sibuk-keliling-usulannya-soal-tunda-pemilu-2024-belum-berlanjut>.

Muhtadi, Burhanuddin, and Eve Warburton. "Inequality and Democratic Support in Indonesia." *Pacific Affairs* 93, no. 1

(2020): 31–58. <https://doi.org/10.5509/202093131>.

Mulya, Fath Putra. “PKS Siap Kawal Pilpres Yang Luber Jurdil Setelah Penetapan Ganjar.” *ANTARA*. April 21, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3500544/pks-siap-kawal-pilpres-yang-luber-jurdil-setelah-penetapan-ganjar>.

“Nama Luhut Di Pusaran Isu Jokowi 3 Periode Yang Diserukan Kepala Desa Sampai Tokoh Daerah.” Accessed March 14, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/14543541/nama-luhut-di-pusaran-isu-jokowi-3-periode-yang-diserukan-kepala-desa-sampai>.

“Nasdem Wacanakan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode.” Accessed March 13, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/26/14535621/nasdem-wacanakan-penambahan-masa-jabatan-presiden-jadi-3-periode>.

“PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi Di Simpang Jalan?” Accessed May 21, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/22/10223631/p-an-masuk-lingkaran-koalisi-jokowi-di-simpang-jalan>.

“PN Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu Ditunda Hingga 2025, Refly Harun: Putusan Gila.” Accessed March 14, 2023. <https://nasional.sindonews.com/read/1036627/13/pn-jakarta-pusat-perintahkan-pemilu-ditunda-hingga-2025-refly-harun-putusan-gila-1677758614>.

“Polemik Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden | Republika Online.” Accessed March 13, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/19/11/22/q1d2fx409-polemik-usulan-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>.

Pratama Taher, Andrian. “Mahfud Tuding Ada Permainan Soal Putusan Penundaan Pemilu 2024.” *tirto.id*, March 5, 2023. <https://tirto.id/mahfud-tuding-ada-permainan-soal-putusan-penundaan-pemilu-2024>.

penundaan-pemilu-2024-gDby.

"Revisi UU KPK: Posisi Presiden Jokowi 'Penyelamat Atau Pembunuh KPK'? - BBC News Indonesia." Accessed March 31, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49643463>.

Ruslan, Heri. "Sejumlah Warga Jakarta Dukung Jokowi Maju Di Pilpres 2014." *REPUBLIKA*, 2013. <https://news.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/21/moqdx9-sejumlah-warga-jakarta-dukung-jokowi-maju-di-pilpres-2014>.

Setiawan, Ken M.P. "Vulnerable but Resilient: Indonesia in an Age of Democratic Decline." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 2022. <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2139168>.

"Sindir Wacana Jokowi 3 Periode Dan Penundaan Pemilu 2024, Ini Kata SBY - Nasional Tempo.Co." Accessed March 14, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1583163/sindir-wacana-jokowi-3-periode-dan-penundaan-pemilu-2024-ini-kata-sby>.

Sisk, Timothy D. *Democracy and Resilience Conceptual Approaches and Considerations*. Stockholm, 2017.

Slater, Dan. "PARTY CARTELIZATION, Indonesian Style: Presidential Power Sharing and the Contingency of Democratic Opposition." *Journal of East Asian Studies* 18, no. 1 (2018): 23-46. <https://doi.org/10.1017/jea.2017.26>.

Tempo. "Makcomblang Di Pematang Sawah." *Tempo*, 2023.

———. "Operasi Senyap Dari Batutulis." *Tempo*, 2023.

"The World Mayor Prize for Friendship between Cities." City Mayors Foundation, 2012. <http://worldmayor.com/contest-2023/about-world-mayor-2023.html>.

Thomas Power, Eve Warburton. "Kemunduran Demokrasi Indonesia." In *Demokrasi Di Indonesia: Dari Stagnasi Ke Regresi?*, 1st ed., 12-16. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.

TV, Metro. "Ketua MPR: Pikir Ulang Gelar Pemilu Di Tahun 2024."

- Indonesia, 2022. <https://youtu.be/3AY3fBeB0nw>.
- Tyson, Adam, and Budi Purnomo. "President Jokowi and the 2014 Obor Rakyat Controversy in Indonesia." *Critical Asian Studies* 49, no. 1 (2017): 117–36. <https://doi.org/10.1080/14672715.2016.1258585>.
- V-dem. "Autocratization Turns Viral." *V-Dem*, 2021.
- Volacu, Alexandru, and Paul Dragos Aligica. "Conceptualising Democratic Resilience: A Minimalist Account." *Contemporary Politics*, 2023. <https://doi.org/10.1080/13569775.2023.2213536>.
- Warburton, Eve. "Jokowi and the New Developmentalism." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52, no. 3 (2016): 297–320. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262>.